

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN****UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **IWAN DANARDONO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **424298**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.175.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m²/120 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m²/120 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 1867 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 2410 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
6. Tanah Seluas 461 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 450.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI TUCSON Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA MONO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 216.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.841.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 166.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.675.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.